

KEWAJIBAN BAGI PEMEGANG LISENSI DALAM MENJAGA RAHASIA DAGANG

Sutrisno
Fakultas Hukum-UPN"Veteran"Jatim

Abstraksi

Rahasia Dagang sebagai salah satu bidang HaKI memerlukan perlindungan hukum seperti dalam UU Hak Cipta, UU Paten dan UU Merek merupakan produk intelektual manusia yang dikatakan sebagai benda bergerak immaterial yang diperoleh seseorang setelah melakukan suatu *Research and development*. Rahasia Dagang *subject matter*-nya berbentuk informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan / atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis dan terjaga kerahasiaannya. Informasi dianggap mempunyai nilai ekonomis apabila dengan status kerahasiaannya, informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial dan meningkatkan keuntungan secara ekonomis. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau pihak-pihak yang menguasainya telah melakukan upaya perlindungan melalui langkah-langkah yang semestinya dan memadai untuk menjaga dan memepertahankan kerahasiaan dan penguasaannya.

Pelanggaran rahasia dagang dianggap telah terjadi apabila terdapat seseorang dengan sengaja mengungkapkan informasi atau mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban (wanprestasi) atas perikatan yang telah dibuatnya baik tersurat maupun tersirat untuk menjaga rahasia dagang dimaksud. Seseorang dianggap telah melanggar rahasia dagang orang lain jika ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan berlakunya UU Rahasia Dagang perlu diperhatikan didalam menentukan kalusula dengan catatan tidak boleh mengganggu perekonomian Indonesia, termasuk pula bagi pemegang lisensi saat membuat *employment agreement* dengan pekerjanya harus memperhatikan kepentingan buruh dalam melakukan kerjanya, karena konsekwensinya apabila rahasia itu tidak dijaga dan diikat dengan klausula tertentu dalam perjanjiannya kemudian dibocorkan, maka rahasia dagang itu bukan menjadi rahasia dagang lagi namun menjadi *domein public*.

PENDAHULUAN

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang (selanjutnya disebut UU Rahasia Dagang) pada tanggal 20 Desember 2000, dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 242 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4044, memberi harapan baru pengaturan salah satu aspek sistem Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HaKI) yang berhubungan dengan informasi yang tidak diketahui umum (dirahasiakan) di bidang teknologi dan/atau bisnis. Karya intelektual ini dibedakan dalam *Intellectual Property* dan *Real Property*. Sebagai HaKI

(*Intellectual Property Rights : IPR*) meliputi unsur hak, kekayaan dan kemampuan intelektual, sehingga secara substansif HaKI (IPR) dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HaKI dalam aspek hukumnya dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*).

Rahasia Dagang mengandung aspek informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi dan ada upaya menjaga kerahasiaannya. Aspek inilah yang membedakan dengan Paten (UU Nomor 13/1997), karena rahasia dagang ini tidak

perlu untuk didaftarkan kecuali kalau terjadi pemberian hak rahasia dagang. Rahasia dagang perusahaan di Indonesia kurang diperhatikan, karena bisa saja terjadi seorang tenaga ahli dari suatu perusahaan berpindah ke perusahaan lain yang sejenis tanpa terikat dengan perjanjian kerahasiaan. Juga dengan mudahnya pegawai suatu perusahaan mengungkapkan rahasia dagang ke perusahaan lain. Hal ini merugikan pemilik rahasia dagang yang telah menginvestasikan biaya *research and development*.

Pelanggaran aspek rahasia dagang bisa juga dilakukan dengan cara menguasai dan meniru informasi produk orang lain secara curang, tanpa lisensi untuk diproduksi dan dipasarkan pada konsumen. Akibatnya pengusaha dirugikan baik dari keuntungan (*royalty*) yang semestinya diperoleh maupun atas kualitas produknya, sehingga yang bersangkutan menuntut ganti rugi, karena melanggar pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat B.W.) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Investor dan pelaku bisnis sangat berkepentingan terhadap perlindungan penemuan teknologi dan rahasia dagangnya melalui sistem perlindungan HaKI sesuai dengan standar internasional. Bagi mereka perlindungan yang memadai terhadap rahasia dagang dan HaKI pada umumnya, merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan perdagangan dan investasi di suatu negara.

Perlindungan rahasia dagang tidak lagi hanya dianggap penting untuk investornya semata, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat seperti dalam kegiatan investasi, pemasaran dan perdagangan. Bagi pemegang lisensi, rahasia dagang memberikan batasan yuridis agar tidak melanggar rahasia dagang yang disebutkan dalam perjanjian lisensi, sehingga pembuatan kontrak kerja yang melindungi rahasia dagang baik itu bersifat formula, proses produksi daftar pelanggan, metode-metode dan sebagainya menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai proteksi kerahasiaan informasi. Undang-undang rahasia dagang merupakan alternatif perlindungan undang-undang teknologi dan bisnis disamping ada perlindungan HaKI

lainnya, karena rahasia daang secara substansif justru dapat melindungi informasi-informasi penting yang terkait dengan teknologi dan bisnis yang semula tidak dapat dilindungi dibawah hukum paten, hak cipta, desain produk industri dan merek.

Dengan perkembangan teknologi, hukum harus disiapkan guna mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya sengketa pelanggaran rahasia dagang yang berkaitan dengan inovasi baru dan sangat potensial untuk ditiru dalam bentuk imitasi. (Oratmangun, 1998 : 18). Berdasarkan latar belakang tersebut, dirasa perlu dilakukan penelitian tentang "Kewajiban Menjaga Rahasia Dagang Bagi Pemegang Lisensi". Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan memahami dengan mendeskripsikan mengenai suatu informasi yang mendapatkan perlindungan sebagai rahasia dagang, (2) untuk mengetahui dan memahami mengenai usaha-usaha dari sudut hukum untuk melindungi rahasia dagang, dan (3) untuk mengetahui dan memahami mengenai klausula yang diperlukan dalam perjanjian lisensi untuk melindungi rahasia dagang.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi rahasia dagang (pasal 1 butir 1 UU Rahasia Dagang), yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Menurut pasal 3 UU Rahasia Dagang, suatu rahasia dagang akan mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Dikatakan pula, bahwa informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan

atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Sedangkan suatu informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Lingkup perlindungan rahasia dagang (pasal 2 UU Rahasia Dagang), meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. UU Rahasia Dagang, mengacu, kepada ketentuan TRIP's yang mengatur mengenai rahasia dagang (*Trade Secret*) dimana terdapat beberapa hal penting dalam sistem perlindungannya antara lain : (1) Perlindungan rahasia dagang (*trade secret*) erat kaitannya untuk menjamin perlindungan yang efektif mengatasi persaingan yang tidak jujur (*protection against unfair competition*) sebagaimana diatur dalam pasal 10 bis Konvensi Paris (pasal 39 ayat 1), (2) Obyeks rahasia dagang adalah informasi yang dilindungi meliputi informasi yang bercirikan informasi yang merupakan rahasia yang tidak diketahui umum, memiliki komersial karena kerahasiaannya, dan telah mendapat perlakuan sedemikian rupa oleh pihak yang secara sah menguasainya, agar terjaga kerahasiaannya (pasal 39 ayat (2)). (Djaman, 1994, 143)

Ditinjau dari substansi rahasia dagang, maka informasi yang dimaksudkan dalam UU Rahasia Dagang itu adalah informasi, termasuk didalamnya formula, pola, kumpulan data/informasi, program, alat, metode/cara, teknik, proses yang memiliki nilai ekonomis karena tidak diketahui oleh umum dan telah diupayakan tetap dijaga kerahasiaannya. (Margono, 2001 : 13)

Perlindungan rahasia dagang dan kewajiban menjaga rahasia dagang secara yuridis dapat dikaji dari teori hak milik, teori kontrak dan teori perbuatan melanggar hukum. (Ramli, 2000 ; 9). Menurut teori hak milik, maka rahasia dagang disejajarkan dengan hak milik, identik dengan assets atau investasi bagi perorangan atau perusahaan.

Dalam ketentuan hukum perdata, hak milik diatur dalam pasal 570 B.W. sebagai berikut : “Hak Milik adalah suatu hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”. (Subekti, 1996 : 171). Sebagai hak milik, rahasia dagang adalah benda tidak berwujud (*intangible*), eksklusif dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang akan menyalahgunakannya.

Syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 B.W. yaitu meliputi (1) sepakat mereka mengikatkan dirinya, (2) cakap untuk membuat suatu perjanjian, (3) suatu hal (obyek) tertentu, dan (4) causa yang dibolehkan. (Syahrani, 1989, 219). Juga memenuhi syarat pasal 23 A.B. Menurut teori perbuatan melanggar hukum, sebelum ada UU Rahasia Dagang, di Indonesia diarahkan pada pasal 1365 B.W. juga pasal 322 ayat (1) Jo 323 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHP) dan pasal 362 bis KUHP. Perbuatan itu dianggap melanggar hak subyektif orang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. (Setiawan, 1992 : 247). Tipe pelanggaran hukum dalam rahasia dagang diantaranya dalam pasal 13 UU Rahasia Dagang : “Pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia yang bersangkutan”. Juga terlihat dalam pasal 14 UU Rahasia dagang : “Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Tujuan berlakunya UU Rahasia Dagang dilandasi unsur filosofi (dikaji dari sisi pembuatan undang-undang), implementasinya maupun tujuan diberlakukannya (untuk mencapai keadilan). Secara universal tujuan hukum adalah mencapai keadilan, dan keadilan meliputi kepentingan daya guna dan kemanfaatan. Menurut J. Bentham dalam "*teori utilities*", hukum bertujuan mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang (aspek kemanfaatan lebih diperhatikan). Tujuan tersebut dimaksudkan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil (Van Apeldorn), ditentukan menurut asas keadilan dan faedah. (Wignydipuro, 1983 : 19).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, artinya suatu kajian yang dilakukan berdasarkan pada penelaahan undang-undang dan keputusan-keputusan Pengadilan. Dengan telaah undang-undang akan diketahui berbagai aspek hukum serta prinsip-prinsip dasar yang terkandung didalam ketentuan tersebut.

Jenis data yang dijadikan sebagai pedoman pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdisi dari bahan penelitian (hukum) primer, sekunder dan tersier. Bahan penelitian primer meliputi UU Rahasia Dagang, peraturan HaKI lainnya dan ketentuan lain yang berhubungan dengan rahasia dagang, putusan pengadilan. Bahan penelitian sekunder berupa kepustakaan selanjutnya dilakukan pengolahan secara induktif yaitu ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus diuraikan secara bebas dan hasilnya dianalisa melalui pembahasan yuridis secara deskriptif berdasarkan literatur yang ada.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Rahasia Dagang

Dasar hukum pengaturan Rahasia Dagang secara universal berhubungan dengan historis perkembangan perubahan paradigma dalam lingkup perdagangan internasional. Paradigma pertama (pasca perang dunia II), aktivitas perdagangan digerakkan oleh produksi dengan penguasaan teknologi dan kelayakan ekonomi. Faktanya terjadi proteksi terhadap produk domestik dan barang dari negara lain tidak boleh masuk negara yang bersangkutan. Akhirnya diperlukan hukum yang meliberalisasi perdagangan internasional, lahirilah *Havana Charter* (1947) dan muncul ide "liberalisasi perdagangan" untuk membetnuk prinsip-prinsip WTO serta GATT yang bertujuan untuk liberalisasi perdagangan dan peningkatan kualitas hidup. Paradigma kedua (periode 1980-an) berkembang market activities (kegiatan perdagangan digerakkan oleh pasar). Forum GAATT semula untuk tujuan penanganan masalah tarif dan perdagangan, sejak 1980 meluas kearah HaKI.

Rahasia dagang atau informasi yang dirahasiakan merupakan salah satu obyek HaKI yang menajdi lingkup pengaturan didalam TRIP's disamping adanya obyek (bidang) lainnya yaitu Hak Cipta dan hak-hak terkait (*Copyright and Related Rights*), Merek Dagang (*Trademarks*), Paten (*Patents*), Desain Produk Industri (*Industrial designs*), Indikasi Geografis (*Geographical Indications*) an Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay-Out Designs/Topographies of Integrated Circuits*). Rahasia dagang termasuk bagian dari HaKI dan memiliki subject metter berupa informasi. Pada prinsipnya Indonesia telah berusaha untuk menyesuaikan berbagai macam undang-undang sesuai dengan pengaturan TRIP's diantaranya dengan memperbaiki undang-undang (Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merek) dan mengeluarkan undang-undang baru, yaitu UU Nomor 30/2000 (Rahasia Dagang), UU Nomor 31/2000 (Desain Industri) dan UU Nomor 32/2000 (tentang

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu).

Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Perbedaan rahasia dagang dengan paten secara umum menurut pendapat Chairul Anwar terdapat 3 perbedaan mendasar yang meliputi :

- a. Unsur-unsurnya. Rahasia dagang mengandung unsur-unsur yang berupa informasi yang tidak diketahui oleh umum, informasi itu melingkup pada bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya (pasal 1 butir 1 UU Rahasia Dagang). Sedangkan paten mengandung unsur-unsur yang dapat berupa suatu penemuan baru di bidang teknologi, penemuan itu mengandung langkah inventif dan penemuan itu dapat diterapkan dalam industri (pasal 2 UU Nomor 6/1989).
- b. Lingkup berlakunya perlindungan. Rahasia dagang memiliki lingkup berlakunya perlindungan terhadap metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum (pasal 2 UU Rahasia Dagang), sedangkan paten merupakan penemuan berupa produk atau proses yang baru dan memiliki kualitas penemuan yang sederhana tetapi mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya (pasal 2 UU Nomor 6/1989 Jo pasal 3 dan pasal 6 UU Nomor 13/1997).
- c. Sifat penggunaan haknya. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan Kantor Paten kepada pemegang paten berdasarkan perundang-undangan paten suatu negara, sedangkan rahasia dagang meliputi pemakaian eksklusif secara de facto atas suatu formula.

- d. Masa berlakunya. Rahasia dagang tidak ada masa berlakunya dan cenderung bersifat ekstensif (luas jangkauannya), tetapi rahasia dagang ini akan berlaku singkat sebagai akibat apabila sudah diketahui oleh umum. Sedangkan paten bersifat limitatif yakni masa berlakunya adalah 20 tahun (pasal 9 UU Nomor 13/1997).
- e. Kedudukan hukumnya. Rahasia dagang tidak memerlukan syarat novelty dan tidak wajib untuk didaftarkan, sebab kerahasiaannya harus dijaga. Sedangkan paten harus memenuhi syarat novelty serta wajib untuk didaftarkan dengan menentukan jumlah klaim yang akan dipatenkan, agar dapat digunakan untuk memproteksi bagi penemuannya, karena menurut ketentuan paten akan dilakukan publikasi terhadap temuan di bidang teknologi tersebut.
- f. Sistem perlindungan hukumnya. Apabila diantara pihak terikat dalam perjanjian rahasia dagang, mereka yang melakukan pelanggaran rahasia dagang secara yuridis dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum (pasal 13 dan pasal 15 UU Rahasia Dagang), akan tetapi bila mereka tidak terikat dengan perjanjian rahasia dagang dan tidak ada kewajiban menjaga kerahasiaan itu maka yang bersangkutan tidak dapat dianggap melanggar hukum kecuali dapat dibuktikan lain (pasal 14 UU Rahasia Dagang) dan dalam proses persidangannya adalah dilakukan dalam lingkup kompetensi peradilan umum (pasal 11 ayat (2) UU Rahasia Dagang). Sedangkan paten relatif mudah melakukan gugatan apabila terdapat pelanggaran atas klaim yang sudah didaftarkan di Kantor Paten berdasarkan fakta hukum atas perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan baik dilihat dari aspek pelanggaran bentuk teknologinya maupun karena memiliki lisensi.
- g. Sifat perlindungan. Sifat perlindungan melalui paten akan membuka atau mempublikasikan teknologi tersebut kepada masyarakat luas selama jangka

waktu perlindungan, sedangkan perlindungan melalui rahasia dagang justru melindungi kerahasiaan dari teknologi tersebut dari adanya upaya pembocoran secara tidak sah.

Hukum akan melindungi kepercayaan yang diberikan penemu kepada seseorang dengan persyaratan kalau orang-orang yang dipercayai penemu itu melakukan pelanggaran perjanjian, maka penemu akan melakukan gugatan atas kerugian yang diderita penemu. Berdasarkan perbedaan tersebut terdapat tiga aspek essential dari suatu rahasia dagang yang meliputi pertama adanya nilai novelty (baru), kedua nilai dalam perdagangan dan yang ketiga tentang secrecy atau sifat kerahasiaannya, yang mana justru sifat secrecy inilah yang merupakan aspek yang terpenting dari suatu rahasia dagang.

2. Rahasia Dagang dalam Hukum Indonesia

Sebagai bahan perbandingan dapat diamati mengenai ketentuan yang terdapat di luar B.W., yaitu meliputi beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. UU Nomor 7/1994 tentang pengesahan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization) khususnya dalam Lampiran perjanjian mengenai *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (perjanjian TRIP's, 1994) Bagian II Bab VII tentang perlindungan atas informasi tak diungkap, pasal 39.
- b. Ketentuan KUHP menegaskan mengenai masalah kerahasiaan sebagaimana terlihat dalam ketentuan pasal 322 ayat (1), pasal 323 ayat (1), pasal 382 bis KUHP.

Pasal 322 ayat (1) KUHP, mengatakan :

- (1) Barang siapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara

selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.

Pasal 323 ayat (1) KUHP, mengatakan :

- (1) Barang siapa dengan sengaja memberitahukan hak ikhwal tentang sesuatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, tempat ia bekerja atau dahulunya telah bekerja, sedang ia diwajibkan merahasiakan hal ikhwal itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.

KESIMPULAN

Suatu rahasia dagang pada dasarnya memiliki subject matter informasi yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum (pasal 2 UU Rahasia Dagang). Suatu informasi mendapatkan perlindungan sebagai rahasia dagang apabila memenuhi kualifikasi sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi dan selalu dijaga kerahasiaannya. Sedangkan tolak ukur perlindungannya didasarkan pada indikator tingkat kerahasiaannya, keterlibatan dengan karyawan, tindakan menjaga kerahasiaan, nilai informasi untuk kompetitor, tingkat perlindungan dan nilai komersial informasi serta tingkat kesulitan dalam memperoleh informasi.

Usaha dari sudut hukum yang dilakukan untuk melindungi rahasia dagang pada prinsipnya berhubungan dengan kewajiban untuk menjaga rahasia dagang agar secara preventif rahasia dagang tetap terjaga dan mencegah terjadinya pelanggaran rahasia dagang (pasal 13 UU Rahasia Dagang). Usaha dimaksud sebagai bentuk implementasi pemegang lisensi dalam melaksanakan kewajiban menjaga rahasia dagang dengan cara menerapkan beberapa

ketentuan yang bersifat mengikat bagi karyawan dengan berpedoman pada hakekat perjanjian kerja (*employment agreement*) diantaranya adanya kewajiban untuk tidak mengungkapkan atau membocorkan rahasia dagang milik perusahaan kecuali sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 15 UU Rahasia Dagang.

Klausula yang diperlukan dalam perjanjian lisensi untuk melindungi rahasia dagang dapat diwujudkan dengan cara antara pemilik lisensi (*licensor*) dengan pemegang lisensi (*licence*) menjadikan model atau format klausula diantaranya pemegang lisensi mengakui dan sepakat, bahwa rahasia dagang yang ditetapkan dalam perjanjian ini merupakan milik pemberi lisensi yang sangat berharga, sehingga pengungkapannya kepada pihak lain adalah dilarang. Klausula lain, pemegang lisensi menyetujui bahwa semua pejabat atau pegawainya akan melaksanakan suatu perjanjian untuk tidak membuka rahasia yang serupa atau identik dengan yang tercantum dalam perjanjian lisensi. Perbuatan melanggar rahasia dagang akan diberlakukan tahapan penyelesaian sesuai dengan ketentuan pasal 16 dan pasal 17 UU Rahasia Dagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kusari, 1995 Perkawinan sebagai sebuah perikatan, Rajawali pers, Jakarta
- Azyumardi Azra, 1996. Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani, Tim ICCE Jakarta.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981. Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW, Hidakarya Agung, Jakarta 1981
- Kamal Muchtar, 1977, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta..
- Ditjen Binbaga Islam, 1996, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta.
- Nadimah Tandjung, 1998, Islam dan Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta.
- Hilman Hadikusumo, 1990, Hukum Perkaan Indonesia, Mandar Maju, Bandung,.
- Mahmud Yunus, 1977, Hukum Perkawinan Dalam Islam, PT. Hidakarya Agung, Jakarta,